



**KETUA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

SAMBUTAN KETUA DPR RI  
DISAMPAIKAN PADA *WORKSHOP* DAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*  
PENGUATAN UNSUR PENDUKUNG DAN PERBAIKAN MEKANISME  
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG  
RABU, 20 JANUARI 2010

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Yang terhormat,

- *Pimpinan DPR-RI*
- *Pimpinan Badan Legislasi DPR-RI*
- *Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai keynote speaker*
- *Pimpinan dan Anggota Komisi DPR-RI*
- *Para Peserta Workshop dan Focus Group Discussion*
- *Para undangan dan hadirin sekalian*

Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa kepada Allah SWT, Tuhan YME, tidak henti-hentinya kita perlu mempersembahkan rasa syukur ke hadirat-Nya, bahwa kita dikaruniai kesehatan yang baik, berkesempatan hadir dalam forum *Workshop dan Focus Group Discussion*, yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI.

Adalah hal yang sangat membahagiakan bagi saya, berada di tengah-tengah saudara hari ini, selain diminta untuk memberikan sambutan, selaku Ketua DPR-RI saya juga akan membuka secara resmi kegiatan *Workshop dan Focus Group Discussion* penguatan fungsi legislasi yang berlangsung hari ini dan besok, selama dua hari penuh. Pimpinan Dewan senantiasa menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap langkah-langkah apapun yang ditempuh bagi peningkatan peran DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi utamanya. Dalam forum semacam ini dapat didiskusikan dan didialogkan berbagai hal utamanya berkaitan dengan fungsi perundang-undangan DPR.

Saya mencatat, *workshop dan focus discussion* fungsi perundang-undangan juga pernah dilakukan oleh DPR masa bhakti 2004-2009, pada bulan Mei 2008 yang mengambil tema: **“Prolegnas sebagai Politik Pembangunan Hukum Nasional”**. Dan untuk *workshop* kali ini, yang diprakarsai oleh Badan Legislasi DPR-RI, mengambil tema yang lebih spesifik/teknis yaitu **“Penguatan Unsur Pendukung dan Perbaikan Mekanisme Pembentukan Undang-Undang”**.

Pilihan tema ini, sebagaimana disampaikan oleh Sdr. Ignatius Mulyono, Ketua Badan Legislasi, didasari berbagai

pertimbangan bahwa Prolegnas akan dapat terealisasi dengan baik apabila ada penguatan unsur-unsur pendukung, ada penyempurnaan mekanisme dalam pembentukan Undang-undang, yang pada akhirnya akan menjadi sarana bagi penguatan fungsi perundang-undangan DPR yang diakui sebagai ***leading sector*** atas pelaksanaan fungsi-fungsi DPR.

*Saudara-saudara para peserta Workshop yang terhormat,*

Sudah lebih dari 64 tahun Indonesia merdeka. Seharusnya, dengan usia tersebut, bangsa Indonesia lebih matang dan dewasa dalam perjalanan kehidupan bernegara. Demokrasi di Indonesia memang telah berproses dengan baik, melalui Pemilu yang selalu berulang setiap lima tahun sekali, bahkan semakin demokratis dengan pemilihan langsung Presiden dan Wakil presiden yang telah berjalan dua kali.

Namun, proses demokrasi yang makin dewasa ini belum sepenuhnya didukung oleh kondisi riil pembangunan hukum dan pembentukan undang-undang di tanah air. Hal ini diakui oleh para pakar/ahli hukum tata negara kita. Mereka mengatakan bahwa perjalanan panjang sejarah bangsa telah mengantarkan kita untuk memahami bahwa masih ada

peraturan perundang-undangan zaman Kolonial yang masih dipakai. Masih banyak pula undang-undang yang kita hasilkan *tumpang tindih* satu dengan yang lainnya, masih dirasakan berbagai undang-undang yang dihasilkan belum sepenuhnya berorientasi pada rasa keadilan masyarakat, keadilan jender, dan kurang menyentuh pada Hak Asasi Manusia.

Dan, satu hal yang sangat mengganggu pikiran dan menimbulkan keprihatinan adalah adanya UU yang dihasilkan melalui pembahasan yang memerlukan waktu lama, kemudian justru dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi.

Dan lebih memprihatinkan lagi, masih banyak UU yang dihasilkan tidak segera ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan sebagainya. Ini artinya bahwa UU yang telah dibuat akan tidak memiliki makna karena tidak segera dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pembangunan hukum di Indonesia harus berjalan dengan komitmen yang kuat untuk benar-benar dapat menjadi “payung hukum”, menjadi pelindung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

*Saudara-saudara para peserta Workshop yang terhormat,*

Sistem ketatanegaraan kita pasca-amandemen UUD 1945 memberikan perubahan peran yang sangat besar bagi DPR-RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 ayat 1 UUD 1945. Telah terjadi **Reposisi DPR-RI** seiring dengan munculnya reformasi, baik dalam fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran.

Hak perundang-undangan tidak lagi di tangan Presiden, tetapi bergeser kepada DPR. Hak-hak DPR yang lain seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, diatur di dalam konstitusi. Demikian pula, hak-hak Anggota DPR seperti hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler, semakin kuat.

Reposisi ini jelas memberikan arah bagi DPR untuk **mengoptimalkan** fungsi, dan tugas-tugasnya. Semua pelaksanaan tugas ini dipantau dan dimonitor oleh masyarakat, yang sekarang ini semakin kritis. Pimpinan Dewan, Pimpinan fraksi dan Pimpinan-Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan berkomitmen untuk memperbaiki citra DPR yang akhir-akhir ini banyak disorot oleh masyarakat.

Upaya dan langkah pencitraan ini jelas harus dilakukan tidak hanya melalui optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi utama Dewan, yaitu fungsi perundang-undangan, pengawasan dan anggaran, tetapi yang tak kalah penting adalah peningkatan kualitas individu para Anggota Dewan sebagai Wakil Rakyat. Dalam kaitan ini, satu hal yang perlu kita kedepankan adalah berbagai pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan juga harus dipedomani oleh etika yang telah diatur secara jelas didalam Kode Etik DPR-RI.

Sejak awal kita semua berketetapan untuk dapat membangun DPR sebagai lembaga yang terhormat, sebagai lembaga wakil rakyat, lembaga yang responsif, aspiratif, sekaligus sebagai lembaga yang mampu meluruskan sejarah perjalanan bangsa yang kadang-kadang tidak sesuai dengan norma-norma dasar didalam kehidupan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional kita.

Ikatan-ikatan yang sangat fundamental dalam kehidupan kita bernegara harus dapat kita pegang teguh agar nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai NKRI harus benar-benar dimaknai bagi terpenuhinya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI yang mendapat Ridho dari Allah SWT. Dalam kaitan inilah maka fungsi-fungsi Dewan,

utamanya di bidang pengawasan yang sekarang sedang menjadi perhatian masyarakat melalui Panitia Angket DPR-RI, harus bersinergi dan berjalan seiring dengan upaya kita bersama dalam membangun citra Dewan sebagai lembaga wakil rakyat yang terhormat. Dan bukan sebaliknya, justru melahirkan tanggapan-tanggapan yang tidak positif bagi kinerja Dewan yang selama ini kita tekadkan agar berjalan dengan lebih baik.

*Saudara-saudara para peserta Workshop yang terhormat,*

Pada akhirnya, saya berharap Workshop ini dapat menghasilkan rekomendasi yang benar-benar dapat memperkuat fungsi perundang-undangan DPR. Saya selaku Ketua Dewan memberikan dukungan terhadap gagasan-gagasan yang tadi telah disampaikan oleh Saudara Ketua Baleg, Saudara Menteri Hukum dan HAM selaku *keynote speaker*, dan tentunya dengan berbagai masukan dari para pakar yang akan berbicara di dalam forum ini.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Baleg dan para Anggota Baleg dan kepada Sekretariat DPR selaku penyelenggara yang memungkinkan Workshop dua hari ini dapat terselenggara.

Dengan ucapan “Bismillahirrohmanirrohim” **Workshop** dan **Focus Group Discussion** Penguatan Unsur Pendukung dan Perbaikan Mekanisme Pembentukan Undang-Undang secara resmi saya buka. Sekian, dan selamat berdiskusi.

**Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, 20 Januari 2010

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**



**H. MARZUKI ALIE**